



An epistemological study of Pancasila as the philosophical foundation of curriculum development in Indonesia

Deodatus Kolek¹, Babang Robandi², Amy Theresia Sipayung³, Sekar Syawalahayati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

deokolek27@upi.edu¹, brobandi@upi.edu², amytheresia@upi.edu³, sekarsyawalahayati@upi.edu⁴

ABSTRACT

The philosophical foundation of curriculum development is an important part of curriculum design. Through this foundation, curriculum developers and implementers acquire concepts related to the curriculum's ideas, goals, materials, methods, and evaluation. However, limited literature discusses the relevance of Pancasila values as a philosophical foundation. Pancasila is mainly discussed at a historical level, as well as its meaning. This study aims to examine the values of Pancasila in terms of epistemology and explore ideas that can be a philosophical foundation for curriculum development. The study used a qualitative approach with a literature study method to examine the epistemology of Pancasila as the philosophical foundation of the curriculum in Indonesia. The analysis process includes a review of the literature on Pancasila epistemology and curriculum in Indonesia and hermeneutic philosophical interpretation. The approach ensures that the research results are reflective and contextual. The results show that Pancasila values, such as religiosity, peace, fraternity, common welfare, and humanism, have relevance as a philosophical foundation in curriculum development. These values can support character and nationality building. In conclusion, this study makes an important contribution to the literature and practice of curriculum development by emphasizing the relevance of Pancasila values as a holistic and contextual philosophical foundation.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 9 Nov 2024

Revised: 24 Jan 2025

Accepted: 27 Jan 2025

Available online: 3 Feb 2025

Publish: 28 Feb 2025

Keywords:

curriculum development;
epistemology; Pancasila;
philosophical foundation

Open access

Inovasi Kurikulum is a peer-reviewed open-access journal.

ABSTRAK

Landasan filosofis pengembangan kurikulum merupakan bagian penting dalam penyusunan kurikulum. Dari landasan ini, para pengembang dan pelaksana kurikulum mendapatkan konsep berkaitan dengan ide, tujuan, materi, metode, dan evaluasi kurikulum. Namun, literatur yang membahas relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis masih terbatas. Pancasila banyak dibahas dalam tataran historis beserta maknanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai Pancasila dari segi epistemologi dan menelusuri ide-ide yang dapat menjadi landasan filosofis bagi pengembangan kurikulum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji epistemologi Pancasila sebagai landasan filosofis kurikulum di Indonesia. Proses analisis mencakup pengumpulan literatur terkait konsep epistemologi Pancasila dan kurikulum di Indonesia, dilanjutkan dengan interpretasi filosofis hermeneutik untuk mengidentifikasi nilai-nilai relevan dari Pancasila. Pendekatan ini memastikan hasil penelitian bersifat reflektif dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti religiusitas, perdamaian, persaudaraan, kesejahteraan umum, dan humanisme, memiliki relevansi sebagai landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Nilai-nilai tersebut dapat mendukung pembentukan karakter dan kebangsaan melalui pendidikan. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur dan praktik pengembangan kurikulum, dengan menegaskan relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis yang holistik dan kontekstual. Pemahaman yang benar tentang nilai epistemologis Pancasila mengarahkan kurikulum di Indonesia pada tujuan yang tepat.

Kata Kunci: epistemologi; landasan filosofis; pancasila; pengembangan kurikulum.

How to cite (APA 7)

Kolek, D., Robandi, B., Sipayung, A. T., & Syawalahayati, S. (2025). An epistemological study of Pancasila as the philosophical foundation of curriculum development in Indonesia. *Inovasi Kurikulum*, 22(1), 493-510.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.



Copyright

2025, Deodatus Kolek, Babang Robandi, Amy Theresia Sipayung, Sekar Syawalahayati. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. *Corresponding author: deokolek27@upi.edu

INTRODUCTION

Kegagalan manusia dalam menghadapi badai *post-truth* (pasca-kebenaran) nampak pada keriuhan yang tampil sangat ramai di media sosial. Kebenaran tidak diterima berdasarkan pada kenyataan objektif tetapi berdasarkan pada pemahaman, perasaan dan pemikiran sendiri (Magnis-Suseno, 2020). Setiap individu atau kelompok tertentu cenderung memaksakan prinsip kebenarannya sendiri ke ranah publik tanpa mempertimbangkan patokan kebenaran objektif.

“Yang penting adalah kebenaran yang aku pahami sebagaimana adanya perasaan dan pemikiranku”.

Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum harus mampu menjadi sarana untuk memperkenalkan kembali pentingnya kebenaran objektif dan nilai-nilai universal sebagai panduan hidup bersama, sehingga dapat meredam dampak *post-truth* yang mengancam nilai-nilai kebersamaan dan keadilan.

Manipulasi kebenaran bisa terjadi dalam segala ranah kehidupan manusia. Manipulasi kebenaran bisa terjadi dalam segala ranah kehidupan manusia. Bahaya yang sangat fatal ialah apabila manipulasi itu sudah jatuh dan mengakar kuat di tingkat penguasa. Kevin Harris menunjukkan bahwa "jenis teori, pengetahuan, bahkan pendidikan yang berlaku dalam status quo disponsori oleh kelas penguasa. Alat utama yang digunakan oleh kelas penguasa untuk melanggengkan status quo di semua tingkatan adalah ideologi" (Akamolafe, 2020). Merujuk pada kalimat tersebut, pengembangan kurikulum berlandaskan Pancasila menghadapi tantangan besar untuk tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan, mengingat adanya potensi bias ideologi yang dimanfaatkan demi kepentingan tertentu.

Dalam konteks Indonesia, untuk mengatasi manipulasi kebenaran tersebut, Pancasila telah disepakati sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki relevansi mendalam sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Nilai-nilai Pancasila yang muncul dari sejarah panjang bangsa ini menjadi dasar bagi ide, implementasi, dan tujuan pendidikan nasional. Tidak mengherankan bahwa setiap perubahan kurikulum nasional, hal yang menjadi landasan filosofisnya ialah Pancasila. Hal ini berbeda dari negara-negara lain yang mendasarkan filsafatnya pada pemikiran filsuf atau pemahaman tertentu. Kurikulum Merdeka misalnya, secara jelas menegaskan bahwa Pengembangan Kurikulum Merdeka berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasar pada sila-sila dalam Pancasila (Devian & Murni, 2023).

Berdasarkan hal ini pentinglah bahwa kajian Pancasila sebagai landasan pengembangan kurikulum diperdalam dari segi kajian filsafat khususnya secara epistemologis. Mengingat pentingnya Pancasila dalam pengembangan kurikulum nasional, menggali kebenaran Pancasila untuk dijadikan landasan pengembangan kurikulum merupakan upaya penting dalam ranah pendidikan nasional. Melalui pendekatan epistemologis, para pendidik dan pengembang kurikulum dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam setiap aspek kurikulum, sehingga kurikulum tidak hanya relevan, tetapi juga mampu menghadapi tantangan seperti *post-truth* yang mengancam nilai-nilai kebersamaan dan keadilan.

Penelitian tentang Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum relatif jarang ditemukan dalam jurnal ilmiah. Sebagian besar penelitian umum lebih fokus pada pembahasan pengembangan kurikulum dan pendidikan tanpa penekanan pada analisis epistemologis Pancasila. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa filosofi yang mendasari Kurikulum Merdeka lebih banyak menyoroti pendekatan filsafat seperti idealisme, pragmatisme, dan realisme, tetapi belum mendalami kaitannya dengan epistemologi Pancasila (Rahman & Robandi, 2024). Fokus penerapan nilai-nilai Pancasila dalam

kurikulum SMP telah diarahkan untuk memperkuat identitas kewarganegaraan, meskipun pendekatan ini lebih bersifat praktis daripada filosofis (Sunarso *et al.*, 2024). Penelitian lain menyoroti integrasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan, tetapi lebih banyak tekanan pada penerapan aplikatif tanpa membahas aspek epistemologis secara mendalam (Bashori *et al.*, 2024). Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai “ruh” pendidikan nasional lebih terfokus pada aspek ideologis tanpa eksplorasi yang cukup terhadap dasar filosofisnya (Gunawan & Wahyudi, 2020). Alasan spesifik penelitian ini didasarkan pada kurangnya pemahaman Pancasila sebagai ideologi dinamis. Pancasila tidak boleh hanya dibahas sebagai dokumen historis tetapi juga sebagai penuntun dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Kebaruan artikel ini terletak pada kajian epistemologis yang menelusuri nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis kurikulum di Indonesia. Pendekatan ini dapat menjadi masukan penting dalam pengembangan kurikulum, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Kajian epistemologis berarti membahas cara berpikir yang dipakai dan menjawab bagaimana Pancasila dapat diterima sebagai landasan filosofis bangsa. Artikel ini melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak fokus pada praktik, dengan memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara konsisten. Berdasarkan kebaruan kajian epistemologis tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang jenis kebenaran filosofis seperti apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum. Permasalahan ini terjadi dalam ranah kenyataan sosial politik yang kerap bias terhadap nilai-nilai kebenaran terutama dalam pemuliaan manusia sebagai manusia. Hipotesisnya adalah bahwa kebijakan pendidikan terkadang mengalami distorsi karena pengaruh kepentingan tertentu, meskipun Pancasila secara jelas menegaskan perlindungan terhadap semua aspek kemanusiaan, baik jiwa maupun raga.

Tujuan artikel ini adalah membahas dari perspektif filsafat khususnya bagian epistemologi bagaimana Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengembang kurikulum, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam merancang kurikulum yang adil, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kontribusi praktis yang diharapkan adalah terciptanya kurikulum yang mampu menjaga integritas nilai-nilai kemanusiaan, memberikan landasan konseptual yang kuat untuk pengembangan kurikulum, serta meminimalkan pengaruh politik yang dapat menyimpang dari prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian lebih lanjut, sehingga memperkaya literatur pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai filosofis lokal.

LITERATURE REVIEW

Landasan Filosofis Pengembangan Kurikulum

Sebagai suatu landasan fundamental, filsafat memegang peranan penting dalam proses pengembangan kurikulum. Dari segi kurikulum, filsafat membantu menentukan tujuan, isi/materi, strategi dan evaluasi dalam kurikulum. Komponen kurikulum yang disusun berlandaskan nilai-nilai filsafat yang tepat menjadi lebih mendalam dan tidak mudah goyah. Melalui bantuan filsafat, pendidikan memiliki arah dan pandangan hidup yang jelas (Noer *et al.*, 2023). Berdasarkan fungsi ini, sangat pentinglah filsafat menjadi landasan untuk penyusunan kurikulum. Hal senada diungkapkan dalam penelitian yang menguraikan bahwa filsafat adalah tulang punggung dan titik awal dalam proses pengembangan kurikulum. Hal ini berkaitan dengan filsafat yang mengarahkan para pendidik dan pengembang kurikulum untuk mengembangkan dan mengatur kurikulum (Tamang, 2023). Filsafat membantu untuk mengklarifikasi tujuan pendidikan, konten yang sesuai, proses pengajaran dan pembelajaran, serta pengalaman dan kegiatan yang harus ditekankan oleh sekolah. Dalam proses pendidikan, filsafat menghendaki agar peserta didik dapat menggunakan kemampuannya secara konstruktif dan komprehensif untuk

menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi (Laksono & Muhtadin, 2023). Filsafat telah masuk ke dalam setiap keputusan penting yang pernah dibuat tentang kurikulum dan pengajaran di masa lalu dan akan terus menjadi dasar dari setiap keputusan penting di masa depan.

Landasan pengembangan kurikulum yang diterima secara umum adalah filosofis, historis, psikologis, dan sosial. Namun, perkembangan beberapa dekade terakhir menambahkan dua bidang lain yang juga perlu mendapat perhatian yang sama dalam masyarakat abad ke-21, yaitu globalisasi dan teknologi. Landasan ini berpengaruh dalam menentukan arah penerapan kurikulum yang memerlukan model-model yang nantinya dapat dijadikan acuan, pedoman atau arahan bagi pergerakan kurikulum ke depan (Safarudin & Rusman, 2021). Seperti landasan yang telah disebutkan, globalisasi dan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kurikulum. Globalisasi telah memungkinkan orang-orang di seluruh dunia untuk bertukar barang, jasa, dan ide dengan lebih mudah, yang secara signifikan mengubah cara mereka hidup dan bekerja.

Sebagian peneliti berpendapat bahwa landasan kurikulum tidak hanya yang disebutkan di atas. Ada yang menambahkan pentingnya landasan yuridis dan ideologis (Akomolafe, 2020). Pembahasan landasan ini memperkuat bangunan kurikulum terutama menyangkut kehidupan masyarakat yang lebih besar. Tetapi agaknya pembahasan yuridis dan ideologis lebih mengarah pada sayap-sayap pembahasan filosofis ataupun sosiologis. Robert S. Zais mengemukakan empat landasan pokok pengembangan kurikulum, yaitu: *philosophi and the nature of knowledge, society and culture, the individual, dan learning theory* (Setiyadi et al. 2022). Dengan berpedoman pada empat landasan tersebut, maka perancangan dan pengembangan suatu bangunan kurikulum yaitu pengembangan tujuan (*aims, goals, objective*), pengembangan isi/ materi (*content*), pengembangan proses pembelajaran (*learning activities*), dan pengembangan komponen evaluasi (*evaluation*), harus didasarkan pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, landasan kurikulum menetapkan batas-batas eksternal tentang kurikulum. Batasan eksternal ini terkait kesinambungannya dalam persoalan-persoalan yang mengitari penyusunan kurikulum yang mengena bagi tercapainya tujuan pendidikan (Rahman & Robandi, 2024). Pembahasan yang diusung berasal dari kenyataan situasi dan tempat serta persoalan manusia di mana kurikulum itu akan diaplikasikan. Selanjutnya, landasan kurikulum mendefinisikan, mengkaji, dan memilah-milah sumber-sumber yang valid untuk memperoleh teori, prinsip, dan gagasan-gagasan dalam bidang kurikulum. Dengan bantuan landasan yang tepat, teori yang dikemukakan dapat dipraktikkan. Prinsip yang muncul relevan dan sesuai zaman serta gagasan - gagasan kurikulum menampilkan kebaruan yang mengarah pada kemajuan.

Berkaitan dengan hal di atas, landasan filosofis sangat penting untuk memberi dasar bagi teori, prinsip dan gagasan kurikulum yang akan diterapkan. Hal ini berkaitan dengan filsafat dapat membantu pengembang kurikulum dalam merumuskan keyakinan, argumen, dan asumsi serta dalam membuat penilaian. Filsafat mengembangkan pandangan yang luas, dan juga membantu dalam menjawab tujuan sekolah, mata pelajaran apa yang penting, bagaimana siswa harus belajar, dan materi serta metode apa yang harus digunakan. Filsafat memberikan titik awal dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan secara keseluruhan (Bandarsyah, 2020).

Aliran filsafat tentang idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan filsafat pendidikan yaitu perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme, semuanya terarah pada penajaman pemahaman yang holistik soal bagaimana kurikulum itu disusun. Misalnya aliran filsafat idealisme yang fokus pada pembahasan tentang pentingnya ide atau gagasan dalam realitas. Ide atau gagasan menjadi hal fundamental dalam alam semesta, sedangkan dunia fisik atau materi hanyalah cerminan atau ekspresi dari ide-ide tersebut (Qolbi & Hamami, 2021). Prinsip-prinsip yang ditawarkan dalam aliran filsafat itu hanya akan bermanfaat jika dibaca dalam konteks tertentu dan untuk tujuan tertentu. Di Indonesia, aliran

filosafat itu tidak ditolak. Penggunaan ide-ide filosofis diterima tetapi tetap fondasi utamanya mengacu pada Pancasila.

Kajian Epistemologi

Setelah memahami pentingnya landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, perlu dikaji lebih dalam bagaimana epistemologi berperan dalam memvalidasi landasan filosofis tersebut. Epistemologi terdiri atas dua kata berikut: *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti ilmu, diskursus, kajian. Dari akar kata ini, epistemologi secara harafiah adalah ilmu atau diskursus rasional tentang pengetahuan dalam konteks filsafat. Sejak era Yunani, persoalan epistemologi pertama-tama tentang kemampuan nalar budi mengenal kebenaran secara pasti. Hal tersebut terkandung dalam persoalan tentang kemajemukan dan kontradiksi opini publik atas kekeliruan, ilusi pancaindra dan kritik atas pengetahuan abstrak (Surajiy, 2021).

Di era modern, epistemologi berkembang pada fokus pada perhatian Descartes tentang pengetahuan yang benar. Hal tersebut muncul karena Descartes melihat bahwa banyak sekali kebenaran yang tampak jelas bagi indra maupun pikiran, namun setelah diselidiki ternyata keliru atau menipu. Ada pengaruh buruk yang menyebabkan kekeliruan tersebut. Akibatnya, kita mengalami ketidakpastian dalam segala hal: apakah kita tertipu atau tidak, ataukah kita sedang bermimpi, bukan dalam kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, setiap individu sebaiknya meragukan semua pengetahuan yang telah diterima tentang dunia dan tubuh sekalipun. Pada dasarnya, salah satu masalah pokok yang muncul dalam epistemologi sejak Descartes adalah masalah kriteria kebenaran pengetahuan dalam kaitan dengan hubungan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui (Putrawan, 2022).

Keraguan ini bukan tentang skeptisme, melainkan keraguan metodis untuk merekonstruksikan pengetahuan yang kokoh, benar, dan sah. Kebenaran, keabsahan, dan kekokohan pengetahuan hanya bisa dicapai apabila telah melalui seluruh proses yang ketat. Keraguan metodis terutama diarahkan kepada indra. Setelah meragukan semua, tinggal satu hal yang mustahil dibantah, berada dan jelas secara faktual: saya yang berpikir. Maka prinsip pengetahuan yang kokoh, benar dan sah adalah saya berpikir, saya ada-*cogito ergo sum* (Juwono, 2024; Surajiy, 2021).

Pemahaman tentang epistemologi terus berkembang dalam filsafat kontemporer. Misalnya, Karl Popper, seorang filsuf pengetahuan, menawarkan kerangka kerja falsifikasi sebagai kriteria kebenaran ilmiah. Menurut Popper, teori ilmiah yang baik harus mampu diuji secara empiris dan dapat dibantah. Sehingga, pengetahuan yang tidak bisa dibantah, justru menjadi ciri khas pengetahuan yang tidak ilmiah. Keilmiahan sains atau ilmu pengetahuan justru ditemukan bila di dalam teorinya itu sendiri ada keterbukaan untuk dievaluasi dan kemungkinan untuk dibantah (Saepullah, 2020). Salah satu pertanyaan kunci dalam epistemologi yang semakin hari menjadi kegelisahannya adalah: Bagaimana kita dapat memastikan kebenaran dari klaim pengetahuan kita? Skeptisisme, yang muncul melalui karya filsuf seperti David Hume mengajukan pertanyaan kritis tentang keandalan pengetahuan kita (Saumantri, 2022). Dari hal ini dapat dikaitkan bahwa fenomena *post-truth* lahir dari konsep-konsep seperti ini dan terus dikembangkan dengan liar di masyarakat luas.

Dalam filsafat ilmu, terdapat persoalan pokok yang dijawab yakni; ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi berkaitan dengan apa hakikat ilmu? Apa yang dibahas dalam ontologi? Dan apa objek kajian ontologi? Hal ini berarti menelusuri kebenaran ilmiah. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana ilmu itu dicapai. Bagaimana kita dapat memastikan kebenaran atau validitas pengetahuan? Bagaimana kita dapat menjelaskan atau memahami pengetahuan? Hal ini menyangkut penelusuran tentang sarana dan tata cara ilmu tersebut, atau bagaimana metode dan paradigma ilmu pengetahuan tertentu diterapkan. Aksiologi, di sisi lain, berkaitan dengan ke mana ilmu itu akan menuju. Aksiologi berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa yang penting atau berharga dalam ilmu pengetahuan? Apa nilai atau

etika yang harus ditaati dalam ilmu pengetahuan? Apa dampak atau konsekuensi dari ilmu pengetahuan itu? Aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai imperatif serta sikap atau *attitude* yang menjadi dampak dari ilmu yang bersangkutan (Rokhmah, 2021).

Kajian epistemologi filsafat Pancasila bermaksud untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Berkaitan dengan epistemologi yang merupakan bagian filsafat, pembahasannya berkisar tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode dan kesahihan pengetahuan (Surajiyo, 2021). Epistemologi Pancasila dimaksudkan mencari sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran dari Pancasila. Sumber pengetahuan dalam epistemologi ada dua aliran yakni empirisme dan rasionalisme (Muhtamar & Ashri, 2020; Surajiyo, 2021). Aliran empirisme berpendapat, bahwa pengalaman menjadi sumber pengetahuan, baik pengalaman yang batiniah maupun yang lahiriah. Pengalaman merupakan ukuran terakhir dari kenyataan. Sedangkan rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah rasio (akal). Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui rasio yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum dan syarat yang dipakai oleh semua pengetahuan ilmiah.

Konsep epistemologi Pancasila pertama-tama mengalir dari pengetahuan empirik yang digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia yang terdiri atas pelbagai suku sejak dahulu sampai sekarang selalu menyeimbangkan semua unsur kodrat manusia yang dalam perwujudannya adalah berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkekeluargaan, dan berkeadilan. Selain itu, kajian epistemologis Pancasila berkaitan erat dengan konsep rasionalisme yang menunjukkan Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Kelima sila yang ada dalam Pancasila merupakan sifat dan hakikat manusia. Para pendiri bangsa ini merenungkan dan menuangkannya sebagai falsafah bangsa (Surajiyo, 2021).

Hubungan Epistemologi dengan Pengembangan Kurikulum

Epistemologi, yang mempelajari hakikat pengetahuan, memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum. Pemahaman tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi menjadi dasar dalam menentukan metode pengajaran, pemilihan konten, dan evaluasi dalam pendidikan. Jika kurikulum didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan bersifat tetap dan objektif, pembelajaran cenderung berfokus pada hafalan dan penguasaan materi. Namun, jika pengetahuan dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dinamis, pendekatan pembelajaran akan lebih interaktif, berpusat pada siswa, dan mendorong kolaborasi serta pemikiran kritis. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pandangan epistemologis dapat memengaruhi pembelajaran secara signifikan terutama dalam pencarian kebenaran (Aulia, 2022).

Integrasi prinsip-prinsip epistemologi, seperti rasionalisme, empirisme, dan konstruktivisme, dalam kurikulum terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Metode pembelajaran berbasis diskusi terbuka, penyelidikan kelompok, dan refleksi memberikan kesempatan bagi siswa untuk tidak hanya menerima informasi tetapi juga mengevaluasi, menganalisis, dan mengembangkan argumen secara mandiri. Penelitian di SD Negeri 3 Tanjungharjo menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam melatih siswa untuk berpikir logis dan analitis, sekaligus membangun rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat berdasarkan bukti yang kuat (Utomo *et al.*, 2024).

Selain meningkatkan keterampilan kognitif, pengajaran berbasis epistemologi juga memiliki dampak positif jangka panjang terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa. Dengan memupuk rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap ide baru, dan keberanian untuk mempertanyakan asumsi, siswa diajak untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang reflektif dan kreatif (Aini *et al.*, 2024). Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk memenuhi kebutuhan akademis, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan berpikir

kritis yang esensial dalam menghadapi tantangan era informasi yang kompleks. Hal ini menjadikan epistemologi sebagai landasan yang penting dalam merancang kurikulum yang adaptif dan inovatif.

Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Kurikulum di Indonesia

Mengapa Pancasila menjadi landasan filosofis kurikulum nasional? Pancasila menjadi landasan filosofis kurikulum nasional karena nilai-nilai filosofisnya yang mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Fungsi Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Di samping itu, secara epistemologi Pancasila menjadi landasan filosofis kurikulum karena memuat gagasan luhur yang berasal dari falsafah hidup bangsa, yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Gagasan Soekarno, Bapa Pendiri Bangsa, tentang Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* itu sebaiknya perlu terus menerus didengungkan di telinga, batin, dan hati kita sebagai rakyat Indonesia (Ramdhani, 2021).

Pancasila bukan seperti ideologi yang lahir di barat seperti liberalisme, kapitalisme, sosialisme ataupun yang lainnya. Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila merupakan hasil kristalisasi gagasan, cita-cita, dan keyakinan yang telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia (Kurniasih, 2016). Pada dasarnya, Pancasila telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, yang tercermin dalam perilaku dan karakter bangsa sebagai bukti nyata keberadaannya.

Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila pada kurikulum untuk membentuk karakter bangsa, Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional mengidentifikasi berbagai nilai utama yang bahwa ada perlu dikembangkan, yaitu:

1. Religius: tunduk pada perintah agama yang mereka anut, toleran terhadap mereka yang sedang menjalani ibadah, dan hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari berbagai agama.
2. Jujur: perilaku yang harus ditanamkan semua orang jika ingin dirinya dipercaya dalam hal tindakan, perkataan, dan pekerjaan.
3. Toleransi: sikap dan Tindakan yang menghargai dalam perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin: tindakan yang merujuk pada perilaku seorang yang tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Kerja keras: perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan atau masalah dalam belajar dan mengerjakan tugas tertentu, serta bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Demokratis: cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menghargai hak dan kewajiban diri sendiri maupun orang lain.
7. Semangat kebangsaan: bisa ditorehkan terhadap cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang luas dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
8. Menghargai prestasi: sikap dan tindakan yang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
9. Bersahabat/Komunikatif: tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain tanpa memandang suku, agama, dan ras.
10. Cinta damai: sikap, tindakan, kegiatan yang dilakukan terhadap semua orang di sekitar agar mereka merasakan nyaman dan senang atas kehadiran kita.
11. Peduli sosial: sikap dan tindakan yang selalu ditunjukkan kepada orang lain yaitu dengan memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

12. Tanggung jawab: sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Jejak Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Kurikulum di Indonesia

Pancasila sebagai dasar filosofis kurikulum tidak hanya terkonfirmasi secara teoretis, tetapi juga terlihat jelas dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia dalam perspektif historis dapat dirunut mulai dari Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka. Berbagai kurikulum tersebut disesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya serta ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pada saat kurikulum diterapkan (Abidin *et al.*, 2023).

Kajian filosofis Pancasila sebagai landasan kurikulum pendidikan muncul pada semua masa kurikulum. Pada masa orde lama (1945-1965) misalnya, meskipun kurikulum di awal kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonial Belanda dan Jepang, semangat yang dibangun terarah pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, pembaharuan kurikulum tahun 1952 mengarah pada sistem pendidikan nasional yang isi pelajarannya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari terutama nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pada tahun 1964 pemerintah mengalami penyempurnaan kurikulum dengan memperhatikan konsep pembelajaran aktif dan produktif dalam menunjang kemanusiaan yang adil dan beradab (Nasir & Muhammad, 2024).

Kurikulum masa Orde Baru (1966-1998) tetap berlandaskan Pancasila dengan pemahaman yang terus berkembang dari perubahan satu ke perubahan berikutnya. Kurikulum 1968 identik dengan muatan mata pelajaran teoritis dan tidak berkaitan dengan kehidupan nyata. Setelah evaluasi, terdapat perubahan yang mengarahkan kurikulum nasional sampai pada konsep Cara Belajar Siswa Aktif (1984). Pada tahap berikutnya, kurikulum nasional 1994 menggunakan sistem caturwulan. Semua materi yang disajikan mendidik anak bangsa pada pemahaman soal ketuhanan, kemanusiaan dan kebersamaan (Abidin, *et al.*, 2023). Pada masa reformasi, kurikulum mengalami perubahan yang sangat cepat. Mulai dari kurikulum berbasis kompetensi sampai pada kurikulum Merdeka memuat pemahaman yang holistik mengenai pembentukan manusia Indonesia yang holistik, cinta tanah air dan berkarakter global. Dasar setiap sila diimplementasikan dalam bidang-bidang kajian mata pelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung (Nasir & Muhammad, 2024).

Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pemaparan kurikulum di Indonesia. Dalam jejak sejarah Pancasila dalam implementasinya dalam kurikulum nasional nilai-nilai seperti ber-Tuhan secara kebudayaan, sehingga tidak ada egoisme agama antara pemeluk agama yang berbeda berhasil subur walaupun riak-riak kecil terjadi. Selain itu, nilai menghargai kemanusiaan rakyatnya, pengakuan atas keberagaman yang diikat dalam bingkai kesatuan, demokrasi yang dihidupi dalam rasionalitas dan semangat untuk saling menghormati, serta memandang manusia lain sebagai subjek yang berdaulat dan akhirnya nilai kemanusiaan masyarakat Indonesia sangat dihargai dalam konteks kehidupannya secara nyata dalam memperbaiki taraf hidup rakyat secara fisik (Latuheru *et al.*, 2020). Sebagai bukti empiris, landasan filosofis yang terkandung dalam Kurikulum Merdeka adalah hasil ekstraksi dari nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah poin-poin landasan filosofis dalam pengembangan Kurikulum Merdeka:

1. Pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang pada dan mempertimbangkan kondisi serta budaya Indonesia.
2. Pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik, untuk tujuan yang lebih luas dan besar.
3. Pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

4. Keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter peserta didik.
5. Keleluasaan satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum dan mengimplementasikannya.
6. Pembelajaran perlu memfasilitasi keberagaman dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.
7. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi Peserta Didik untuk terus berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
8. Guru memiliki otoritas dalam mendidik peserta didik dan mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran.

Keunikan kurikulum di Indonesia memang terletak pada landasannya yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu sebenarnya bersifat universal. Dalam sistem pendidikan Finlandia yang telah menjadi pusat perhatian global karena keberhasilannya dalam membangun kemandirian dan semangat belajar siswa, landasan filosofis pendidikan negara ini mencerminkan budaya kesetaraan yang erat terkait dengan sejarah dan nilai-nilai masyarakatnya. Kepercayaan akan potensi setiap individu menjadi pondasi bagi pendekatan yang memandang setiap siswa sebagai entitas yang memiliki hak dan nilai yang setara (Cahyani, 2023).

Contoh lain ialah Jepang. Negara Jepang masyarakatnya menganut filsafat bahwa manusia dapat diubah keadaan dan sifatnya melalui usaha orang lain atau usaha sendiri. Dasar filosofis Jepang tidak menerima bahwa manusia sudah sejak semula ditetapkan dalam keadaan tertentu yang tidak dapat diubah. Paham filsafat ini merupakan nilai-nilai filsafat kolektivisme, yaitu paham yang memiliki pendirian moral, etika politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kepentingan kolektif atau kelompoknya. Kolektivisme berfokus pada masyarakat atau kepentingan nasional dalam berbagai jenis sistem politik, ekonomi dan pendidikan (Ningsih *et al.*, 2025).

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji epistemologi Pancasila sebagai landasan filosofis kurikulum di Indonesia. Penelitian kualitatif dilakukan dalam latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi serta melibatkan berbagai metode yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif sebuah fenomena guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi data secara menyeluruh dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur akademik yang sistematis dalam rentang waktu 2019-2024. Literatur yang dikaji meliputi artikel ilmiah tentang filsafat, epistemologi, kurikulum, dan Pancasila, serta buku akademik dan dokumen kebijakan resmi yang relevan. Pencarian dilakukan pada database seperti Google Scholar, DOAJ, dan Portal Garuda menggunakan kata kunci spesifik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya sumber yang berkualitas dan relevan yang dianalisis dalam penelitian ini.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup artikel *peer-reviewed* dan buku akademik yang relevan dengan fokus penelitian, serta literatur yang membahas aspek epistemologis Pancasila atau pengembangan kurikulum di Indonesia. Publikasi yang dipertimbangkan berasal dari rentang waktu 2019-2024 untuk memastikan relevansi dan keterkinian data. Sebaliknya, literatur yang tidak memenuhi standar akademik atau tidak relevan dengan tema penelitian dikecualikan. Peninjauan abstrak dan isi penuh dilakukan untuk menyeleksi literatur secara ketat.

Prosedur analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi kualitatif yang terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data literatur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tahap kedua melibatkan analisis isi menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan utama terkait epistemologi Pancasila dalam kurikulum. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada temuan yang telah dianalisis secara sistematis dan terorganisir.

Validitas dan reliabilitas data dijamin melalui beberapa strategi yang ketat untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan berbagai literatur agar konsistensi data dapat terjaga. Hasil analisis juga ditinjau melalui proses *peer review* oleh ahli filsafat dan pendidikan guna memastikan akurasi interpretasi. Selain itu, audit trail diterapkan untuk mendokumentasikan seluruh proses analisis secara transparan dan memungkinkan replikabilitas.

Hasil analisis data menghasilkan pemetaan yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai epistemologis Pancasila terintegrasi dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Proses analisis mencakup identifikasi tema utama, kategorisasi data, dan penarikan kesimpulan berbasis bukti dari literatur yang dikaji. Teknik analisis data untuk menunjang interpretasi filosofis menggunakan hermeneutika yakni penafsiran atas data-data yang ada. Pendekatan sistematis ini dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman filosofis dalam pengembangan kurikulum berbasis Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan filosofis kurikulum di Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep Dasar Nilai-Nilai Pancasila

Kedudukan Pancasila di negara Indonesia telah diakui sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sebagai pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kristalisasi pemikiran yang telah diterima secara kolektif oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini harus terus diimplementasikan dalam kehidupan nyata, terutama dalam proses pembangunan bangsa (Nurafifah & Dewi, 2021). Secara konseptual, Pancasila memberikan alternatif pemikiran dalam berbagai segi kehidupan manusia, serta mampu mengantisipasi arus pemikiran dan perkembangan ideologi global secara komprehensif. Namun, peran Pancasila dalam konteks ini perlu dibandingkan dengan temuan penelitian lain yang membahas kontribusinya terhadap pendidikan, untuk memberikan perspektif yang lebih kritis dan relevan.

Pancasila adalah gagasan yang berasal dari kebudayaan Indonesia, yang mencerminkan nilai-nilai asli bangsa. Nilai-nilai ini dirancang untuk menjadi dasar dalam pengembangan ilmu dan panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, Pancasila menyediakan kriteria tertentu untuk menilai fenomena, membuat ramalan, dan memberikan anjuran praktis (Lituaily & Ratuanak, 2024). Setiap sila dalam Pancasila memiliki perannya masing-masing dan penting untuk dipahami secara mendalam. Misalnya, sila pertama menegaskan hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan sila kedua hingga kelima mengatur hubungan antar individu dan negara. Dalam hal ini, struktur pembahasan nilai-nilai Pancasila perlu diperjelas dengan subjudul untuk setiap sila, sehingga pembaca dapat memahami kontribusi masing-masing nilai secara lebih sistematis.

Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai motivasi utama dalam sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Kelima sila Pancasila adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dan tak terpisahkan. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bagaimana nilai-nilainya tetap relevan di tengah perubahan global, termasuk era digital (Febriyanto, 2018). Misalnya, pengaruh digitalisasi terhadap pengamalan nilai Pancasila dapat dianalisis melalui data empiris, seperti survei tentang perilaku masyarakat dalam mengakses media sosial. Data ini akan memperkuat pembahasan dan memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi.

Di era *post-truth*, melemahnya pegangan terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dapat mengancam tatanan sosial. Informasi di jagat maya sering kali tidak berlandaskan kebenaran, sehingga menggerus nilai-nilai karakter positif yang khas Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi ujung tombak dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila, baik melalui kurikulum formal maupun praktik sehari-hari. Implementasi ini membutuhkan pendekatan yang berbasis data, seperti tingkat pemahaman pelajar tentang Pancasila dan pengaruh pendidikan karakter dalam memperkuat nilai-nilai tersebut.

Aspek epistemologis Pancasila menekankan tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang selaras dengan moral dan kejujuran. Nilai-nilai Pancasila mendorong insan keilmuan untuk menjaga integritas, mulai dari proses gagasan hingga hasil akhir (Lituaty & Ratuank, 2024). Dalam konteks kurikulum, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan fondasi utama dalam penyusunan dan implementasi pendidikan. Hal ini memerlukan eksplorasi mendalam untuk memastikan bahwa setiap nilai Pancasila dapat diterjemahkan secara praktis dalam dunia pendidikan. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi, tetapi juga landasan nyata dalam membangun bangsa yang berkarakter dan berdaya saing di tengah tantangan global.

Nilai Kebenaran Pancasila

Kenyataan destruktif yang terjadi di masyarakat Indonesia mencederai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Berbagai permasalahan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan menurunnya penghormatan terhadap hukum, etika, moral, serta kesantunan sosial (Erlina, 2019). Selain itu, meluasnya peredaran narkoba, tawuran pelajar, dan konflik sosial bernuansa SARA semakin menunjukkan adanya penyimpangan. Tantangan ini diperburuk oleh arus globalisasi dan penetrasi budaya sekuler Barat di era digital.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan nilai religius yang mendasari bangsa ini. Lebih dari itu, sila pertama mengacu pada keyakinan sesuai kepercayaan masing-masing dalam kerangka negara multiagama yang bukan sekuler. Habermas menekankan pentingnya "sikap epistemik" (*epistemische Einstellung*) dalam beragama untuk deliberasi publik (Kholiq & Fatih, 2021). Sikap ini relevan untuk Indonesia dalam mendorong dialog religius yang inklusif dan rasional di masyarakat plural.

Tidak bisa dipungkiri era digital berisiko menimbulkan dampak bagi penggunanya. Dampak negatif dari penggunaan digital adalah sekularisme yang dapat melunturkan norma, karakter, perubahan gaya hidup, keteguhan iman dalam beragama dan lebih banyak lagi (Widiandari *et al.*, 2023). Untuk itu, perlu adanya internalisasi nilai-nilai religius sebagai benteng terhadap hal-hal negatif yang ada.

Mendialogkan doktrin religius secara rasional inklusif adalah respons Habermas terhadap masyarakat pasca-sekuler (Kiom, 2020). Dalam konteks Indonesia, dialog ini dapat menghadapi tantangan intoleransi, konflik bernuansa agama, dan bias informasi di media sosial. Kurikulum sekolah berbasis Pancasila dapat memperkuat moderasi beragama melalui pengajaran pluralitas dan toleransi. Pendidikan seperti ini menjadi penting untuk mengatasi kesenjangan antara idealisme sila pertama dan kenyataan sosial.

Indonesia juga menghadapi tantangan di era Disrupsi Revolusi 4.0 dan Society 5.0 yang memengaruhi pemahaman agama (Nurcahyawati *et al.*, 2023). Media sosial yang tidak terfilter menyebarkan informasi bias dan provokatif yang sering memicu konflik. Literasi digital berbasis nilai Pancasila menjadi langkah penting untuk meredam dampak negatif ini. Kurikulum harus dirancang untuk membantu siswa mengenali hak dan kewajiban dalam kehidupan beragama yang harmonis.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, adalahantisipasi konflik baik global maupun lokal (Melani *et al.*, 2023). Sila ini menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan

untuk berlaku adil dan beradab. Dalam perspektif Hobbes, manusia cenderung egois dan mencari kekuasaan sendiri, yang berbeda dengan idealisme Pancasila (Zulfan, 2018). Manusia dalam keadaan alamiah menurut Hobbes layaknya serigala untuk manusia lainnya atau *Homo Homini Lupus*. Manusia akan berusaha untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara menyerang atau menguasai orang lain terlebih dahulu agar tak diserang, perang semua manusia melawan semuanya atau *Bellum Omnium Contra Omnes* (Darussalam et al., 2024). Untuk itu, nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, gotong royong, dan cinta kasih perlu diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan.

Menurut Hobbes, manusia secara alami memiliki kecenderungan konflik, kejam, dan egois yang mengutamakan kepentingan pribadi (Juliyanto, 2019). Pemikiran ini berbeda dengan prinsip Pancasila yang menekankan keadilan dan persaudaraan antarindividu. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakekat manusia harus adil dalam hubungan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan yang Maha Esa (Ramadani et al., 2023). Oleh karena itu, sila kedua harus terus diingatkan sebagai landasan untuk menciptakan hubungan yang adil dan beradab.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi pedoman perdamaian dan keharmonisan di tengah keberagaman bangsa. Nilai persatuan tidak hanya menguatkan hubungan antar warga negara tetapi juga menekankan perdamaian dengan bangsa lain. Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, tindakan yang tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, dan menyebarkan berita hoaks merupakan contoh dari indikasi kebencian yang dapat meruntuhkan persatuan (Irawan et al., 2023).

Konsep persatuan yang diusung Pancasila membawa meneguhkan semangat untuk berjalan bersama dalam peradaban modern yang maju. Kompetensi literasi digital dalam membina persatuan untuk menciptakan keharmonisan menjadi sangat perlu. Sebagai contoh: masalah pelaporan yang salah, ujaran kebencian dan konten negatif. Cakap dengan media digital akan mengatasi masalah ini dengan kemampuan untuk menggunakan mesin pencari dan alat digital untuk mendeteksi pemalsuan, menggunakan mesin pencari untuk memilih konteks yang menipu, memeriksa, perangkat digital negatif dan konten yang menipu untuk diliput (Tinambunan et al., 2022). Kemampuan ini diperlukan untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan upaya untuk memajukan manusia berkembang pesat. Selain itu, implementasi sila ketiga dapat juga dengan cara kebersamaan dan persatuan pada seluruh rakyat Indonesia, menghargai perbedaan, meleraikan perpecahan, cinta kepada Indonesia, serta mewujudkan semboyan dari negara Indonesia (Saparina & Dewi, 2021).

Saat ini, teknologi modern telah menghubungkan manusia melalui internet seperti jaring laba-laba (Maharani et al., 2023). Kemudahan ini seharusnya digunakan untuk mempererat hubungan antarbangsa dan memperjuangkan perdamaian global. Namun, realitas menunjukkan bahwa teknologi sering digunakan untuk menyebarkan kebencian yang memicu konflik. Implementasi nilai sila ketiga dalam pendidikan dapat mengatasi tantangan ini dengan membangun rasa cinta kepada negara dan persatuan.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung makna demokrasi yang mendalam. Demokrasi dalam Pancasila mencerminkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dengan mengedepankan musyawarah. Permusyawaratan menekankan pengambilan keputusan secara bersama melalui kebijaksanaan. Pendidikan berbasis Pancasila harus membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya musyawarah dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan (Susanto, 2021).

Dalam konteks abad ke-21, kolaborasi menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu (Melani et al., 2023). Kolaborasi memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sekaligus memiliki landasan moral yang kuat. Pendidikan Pancasila membantu siswa membangun karakter yang adaptif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan dunia modern. Hal ini juga memastikan demokrasi yang santun tetap terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan komutatif dan distributif (Januri & Lita, 2023). Keadilan komutatif memberikan hak yang sama tanpa memandang jasa, sedangkan keadilan distributif mempertimbangkan proporsi sesuai kebutuhan. Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai keadilan sosial kepada peserta didik melalui kebiasaan hidup adil di sekolah. Dengan cara ini, siswa belajar menghormati hak dan kewajiban serta memahami pentingnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat.

Keadilan sosial juga mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang (Lestari et al., 2020). Kurikulum berbasis Pancasila harus mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam setiap tingkatan pendidikan. Hal ini bertujuan agar siswa memahami bahwa keadilan tidak hanya berlaku untuk individu tetapi juga masyarakat luas. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dapat menjadi landasan dalam menciptakan generasi yang adil dan bertanggung jawab.

Kontribusi Nilai Pancasila Bagi Landasan Filosofis Pengembangan Kurikulum

Pendidikan di Indonesia harus memungkinkan peserta didik untuk dapat berpikir kritis, holistik, dan bangga dengan jati dirinya sebagai anak Indonesia. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia dicirikan sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan bertindak sesuai norma Pancasila (Dewi, 2022). Hasil dari pendidikan ini melahirkan peserta didik yang dapat mengembangkan keterampilan mereka sesuai dengan karakteristik Pancasila, yang mencakup iman dan akhlak mulia, keberagaman global, semangat gotong royong, kreativitas, pemikiran kritis, dan kemandirian (Prasety & Widiadi, 2022).

Ada beberapa kontribusi nilai Pancasila yang kebenarannya dan kedalamannya relevan bagi bangsa ini. Pertama, nilai religius yang terus hidup dengan pendalaman yang lebih elegan dengan sikap epistemik. Nilai ini dapat menjadi materi ajar dalam sekolah-sekolah baik dalam praktik maupun dalam teori-teori di buku-buku agama masing-masing. Kontribusi nilai ini didukung dengan penelusuran ilmiah soal keagamaan yang bersangkutan terutama berkaitan dengan batas-batas yang harus dilakukan. Sebagai contoh, Indonesia telah akrab dengan istilah moderasi beragama. Konsep ini dapat dikembangkan di dunia pendidikan khususnya dengan penyusunan kurikulum yang mengutamakan sikap epistemik di antara perbedaan agama (Lisa & Kurnia, 2023).

Nilai Pancasila juga dapat berkontribusi pada pendalaman tentang manusia yang utuh. Di era digital ada keraguan terhadap makhluk bijak (*homo sapiens*) yang akan bergeser menjadi makhluk digital (*homo digitalis*). Akhir dari pergeseran itu akan berpengaruh pada manusia sebagai makhluk sosial (*homo socialis*). Pengaruh itu menyangkut bagaimana sebagai makhluk sosial secara kodrat mempunyai ciri khas yang komunikatif, terbuka terhadap sesama manusia, makhluk hidup, dan lingkungan hidup menampilkan diri. Pergeseran ini berpengaruh pada paham kebenaran di zaman ini yang biasa dikenal kebenaran performatif. Kebenaran performatif yakni kebenaran itu dibuat oleh yang memiliki otoritas atau kompetensi dengan membuat pernyataan. Kebenaran performatif inilah yang berlaku dalam komunikasi digital, karena di dalam komunikasi digital kebenaran lebih diciptakan daripada ditemukan. Serial hoaks yang disebarluaskan terus menerus secara masif akan berubah menjadi kebenaran. Hoaks mendapat status epistemis untuk menuntun praktik. Dalam arti ini 'kebenaran' hoaks berciri performatif, yaitu dibuat real lewat tindakan *digital posting, chatting, uploading*, dan seterusnya (Hardiman, 2018). Kurikulum dapat disusun berlandaskan pemahaman tema-tema ini dengan memberi penekanan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Tema tentang perdamaian sangat relevan dalam kontribusinya untuk mendidik anak bangsa. Hal ini berkaitan erat dengan kegelisahan global yang selalu ada pemantik untuk mengarah pada peperangan. Nilai persatuan di tengah perbedaan perlu penjabaran secara konkret di lingkungan sekolah. Selanjutnya, nilai persaudaraan dapat digali melalui media kebudayaan. Sebagai contoh, sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dapat dijadikan inspirasi. Di sekolah ini, peserta didik ditanamkan nilai-

nilai yang berasakan kemerdekaan, kodrat alam, kebangsaan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Hal yang biasa dikenal ialah sistem among. Sistem ini adalah sebuah sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan pada anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan sendiri. Sistem ini memadukan pendidikan gaya Eropa dan seni-seni Jawa tradisional. Pendidikan berorientasi pada kebudayaan-kebudayaan timur dan mengedepankan nilai-nilai kerohanian yang dibarengi dengan kekuatan intelektual (Fajri & Trisuryanti, 2021). Alhasil, setiap peserta didik yang lulus dari sekolah ini menyandang seorang pribadi yang tangguh, cinta tanah air dan religius. Pancasila memiliki dimensi formatif yang menjadikan masyarakat antarbudaya di Indonesia sebagai masyarakat yang berdialog dan bersaudara atas dasar nilai-nilai universal yang terkandung didalam sila-silanya. Persaudaraan ini membangun semangat untuk saling menguatkan. Melalui persaudaraan dalam komunitas dan khusus lembaga pendidikan tidak seorangpun yang tersingkirkan. Relasi saling memberi dan menerima terwujud (Prasetyono, 2022).

Nilai lain yang dapat menjadi landasan filosofis ialah ide mengenai kesejahteraan umum. Hal ini berkaitan erat dengan cita-cita demokrasi dan keadilan yang juga dirumuskan dalam sila keempat dan kelima. Jika dilihat dari katanya, secara harafiah. kesejahteraan umum, dapat berarti kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan bersama (Komalasari et al., 2022). Berdasarkan arti harafiah ini, kesejahteraan umum merujuk juga pada keselamatan banyak orang (*salus populi*). Dalam pepatah Latin *salus populi suprema lex esto* (hendaknya keselamatan menjadi hukum tertinggi) serupa dengan pengertian yang mengacu pada kesejahteraan umum (*bonum commune*). Ide ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang pembelajaran terutama dalam ilmu-ilmu sosial. Sebagai sebuah acuan dalam semua aspek kehidupan terutama dalam pendidikan dan hukum, Pancasila dalam epistemologis, menjadi sebuah kebenaran dan dengannya menjadi acuan kebenaran. Konsep yang ingin menggagalkan atau menyingkirkan Pancasila merupakan pengaruh *post-truth* atau skeptisisme yang kebablasan. Lebih lagi, Pancasila sudah diakui bukan hanya Indonesia tetapi juga tingkat dunia (Pristiwiyanto, 2021).

Dalam pengembangan kurikulum, kontribusi Pancasila sebagai landasan filosofis mengarah pada seluruh komponen pendidikan mulai dari penyusunan kurikulum hingga guru dan tenaga kependidikan, siswa, metode pengajaran, fasilitas dan sumber belajar, evaluasi dan penilaian, lingkungan belajar, serta kebijakan, dan manajemen sekolah. Ide-ide itu dapat diterapkan sesuai dengan porsi dan kecocokannya masing-masing (Azzahra et al., 2022). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang digali dengan kajian epistemologis mendukung tujuan pendidikan nasional dalam membangun manusia Indonesia. Landasan filosofis yang menekankan prinsip praktis tanpa memperhatikan prinsip konsep dan abstraksi dapat mengaburkan arti pendidikan yang sebenarnya. Hal ini berkaitan dengan pembangunan integral manusia. Seperti pendapat Tan Malaka yang menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah usaha untuk membebaskan manusia dari kesengsaraan, ketertindasan, dan ketidaktahuan, menjadikan hidup lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan sekitarnya, tidak ada lagi kasta dan pembeda kelas-kelas (Rokhim et al., 2019).

Landasan filosofis yang dimuat dalam kurikulum seperti kurikulum Merdeka, yang telah ditampilkan dalam kajian literatur. lebih banyak berfokus pada peserta didik dan belum mencakup keseluruhan dinamika sekolah. Landasan filosofis sebaiknya mencakup keseluruhan ide dan bersifat umum serta sebagai pengarah sebuah dinamika pendidikan berjalan mencapai tujuan secara optimal. Sebagai contoh implementasi praktis pendidikan berbasis Pancasila yang dapat menjadi inspirasi terdapat dalam penelitian. Penelitian ini menelusuri proses pembelajaran di Madrasah Aliyah swasta Alishlahiyah Binjai yang mengintegrasikan nilai dan norma sila-sila Pancasila. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui budaya sekolah dapat meningkatkan karakter peserta didik, dilihat dari sikap dan juga tindakan peserta didik (Yusuf et al., 2023).

CONCLUSION

Pancasila, sebagai landasan filosofis, menawarkan pendekatan epistemologis yang kuat untuk pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Dengan menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar konseptual, kurikulum tidak hanya menjadi sarana pendidikan yang adil dan konsisten tetapi juga mampu mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan kearifan lokal. Pembahasan dari sudut pandang filsafat epistemologi memberikan panduan teoretis yang diperlukan untuk merancang kurikulum yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan menjaga integritasnya dari intervensi politik.

Secara praktis, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum untuk membangun generasi yang tidak hanya memiliki kecakapan akademik tetapi juga karakter yang sesuai dengan prinsip moral dan budaya bangsa. Penelitian ini juga mengonfirmasi relevansi Pancasila sebagai landasan yang mampu menjawab tantangan global tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan aplikasi praktisnya, implementasi kurikulum berbasis Pancasila memerlukan penyesuaian pada setiap jenjang pendidikan. Penelitian lanjutan yang lebih mendalam akan semakin memperkuat gagasan ini.

Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada eksplorasi hubungan praktis antara nilai-nilai Pancasila dengan elemen-elemen spesifik dalam kurikulum, seperti silabus, metode pengajaran, atau materi pembelajaran. Kajian ini penting untuk memahami sejauh mana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam proses pendidikan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih terperinci tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Misalnya, di tingkat PAUD, fokus dapat diarahkan pada penanaman nilai-nilai dasar seperti toleransi dan kerja sama, sedangkan di tingkat perguruan tinggi, penekanannya dapat beralih pada penguatan etika profesional dan tanggung jawab sosial.

Penelitian berbasis kuantitatif juga sangat direkomendasikan untuk mengukur efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Penelitian ini dapat memberikan data konkret mengenai pengaruh penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap penguatan karakter siswa, perilaku sosial mereka, serta hasil pembelajaran. Selain itu, pendekatan kualitatif seperti studi kasus atau etnografi pada institusi pendidikan tertentu yang sudah aktif mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dapat memberikan wawasan mendalam. Studi semacam ini dapat mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta strategi implementasi yang digunakan dalam proses tersebut. Dengan berbagai pendekatan ini, diharapkan penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai Pancasila.

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

REFERENCES

- Abidin, D., Retnaningrum, E., Parinussa, J. D., Kuning, D. S., Manoppo, Y., & Kartika, I. M. (2023). Curriculum development in Indonesia from a historical perspective. *Journal of Education Research*, 4(2), 443-451.
- Aini, Q., Noviani, D., & Aina, Q. (2024). Teori ilmiah dalam konsep pendidikan Islam. *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 4(1), 630-637.
- Akomolafe, M. A. (2020). Philosophy of education and the ideological underpinning of the curriculum. *International Scientific Journal of Universities and Leadership*, 2(10), 3-12.

- Aulia, S. (2022). Teori pengetahuan dan kebenaran dalam epistemologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3), 242-249.
- Azzahra, F., Permana, H., Fitriani, L., Putri, R. M., & Wulandari, S. (2022). Approaches and models development of 2013 Curriculum and Merdeka Curriculum. *Curricula: Journal of Curriculum Development*, 1(2), 189-204.
- Bandarsyah, D. (2019). Fondasi filosofis pendidikan sejarah di era post truth. *Historia*, 3(1), 1-10.
- Bashori, A., Sugitanata, A., Putra, A., & Abdurrasyied, M. H. (2024). Grounding moral moderation in addressing the erosion of social values. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 22(1), 74-94.
- Cahyani, L. N. (2023). Sistem pendidikan finlandia: membangun kemandirian dan semangat belajar siswa. *Journal of Contemporary Issues in Primary Education*, 1(2), 55-61.
- Darussalam, F. I., Indra, A. B., & Rahman, S. (2024). Hakikat manusia dan relevansinya terhadap isu-isu kemanusiaan: Analisis komparatif filsafat politik Thomas Hobbes dan John Locke. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 5(2), 219-234.
- Devian, L., & Murni, I. (2023). Konsep merdeka sebagai landasan pendidikan di era kurikulum merdeka belajar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 1974-1993.
- Dewi, M. R. (2022). The advantages and disadvantages of project-based learning for strengthening the student profile of the Pancasila independent curriculum. *Journal of Curriculum Innovation*, 19(2), 213-226.
- Erlina, T. (2019). Membangun karakter ke-indonesiaan pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan di era global. *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 8(2), 153-162.
- Fajri, S., & Trisuryanti, T. (2021). Gagasan sistem among Ki Hajar Dewantara dalam membangun pendidikan di Indonesia Sejak 1922 sampai dengan 2021. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 3(1), 18-27.
- Febriyanto, M. (2018). The role of Pancasila as an open ideology. *Jurnal Scientia Indonesia*, 4(1), 27-46.
- Gunawan, I., & Wahyudi, A. V. (2020). Fungsi filsafat Pancasila dalam ilmu pendidikan di Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 209-218.
- Hardiman, F. B. (2018). Manusia dalam prahara revolusi digital. *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, 17(2), 177-192.
- Irawan, A. P., Irawatie, A., & Mulyana, P. D. (2023). Ujaran kebencian dalam penyimpangan sila ke-2 Pancasila. *Ikraith Abdimas*, 7(3), 314-322.
- Januri, J., & Lita, N. (2023). Hakekat keadilan dalam perspektif filsafat hukum. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 128-134.
- Juliyanto, A. (2022). Ajaran Thomas Hobbes tentang Negara sebagai "Leviathan". *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 1(1), 13-28.
- Juwono, K. (2024). "Epistemologi moluska" Bruno Latour dan paradigma non-modern pengetahuan. *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, 20(1), 98-134.
- Kholiq, A., & Fatih, M. K. (2021). Epistemologi kritis: telaah pemikiran hermeneutika Jurgen Habermas. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 4(2), 174-185.
- Kirom, S. (2020). Individu komunikatif menurut Jurgen Habermas dalam perspektif filsafat manusia. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama, dan Kemanusiaan*, 6(2), 202-216.
- Komalasari, S., Amelia, D., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a legal development paradigm. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(6), 18-23.

- Kurniasih, R. (2016). the effect of globalization on the ideology of Pancasila. *Jurnal Scientia Indonesia*, 2(1), 69-96.
- Laksono, T. A., & Muhtadin, M. A. (2023). Hubungan filsafat, teori belajar dan kurikulum pendidikan. *Diajar: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1), 57-62.
- Latuheru, A. C., Lattu, I. Y., & Tampake, T. R. (2020). Pancasila sebagai teks dialog lintas agama dalam perspektif Hans-Georg Gadamer dan Hans Kung. *Jurnal Filsafat*, 30(2), 150-180.
- Lestari, P., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2020). Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila kelima dalam pembelajaran. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2), 130-144.
- Lisa, M. & Kurnia, H. (2023). Upaya meningkatkan pendidikan Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 472-478.
- Litually, J. R., & Ratuanak, A. M. D. (2024). Pancasila sebagai landasan ideologis bagi pengembangan keilmuan pada komunitas akademik di Indonesia dan tantangan globalisasi. *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 281-294.
- Magnis-Suseno, F. (2020). Philosophy, a challenge to post-truth, also in Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 1-22.
- Maharani, S., Habibah, S. M., & Hilshcer, R. (2023). Actualizing the nationalism attitude of millennial generation towards pancasila and citizenship education in the digital era. *Jurnal Civicus*, 23(1), 1-10.
- Melani, J. A., Asbari, M., Wahyudi, J., & Santoso, G. (2023). Mengapa Pacasila perlu ada? Telaah singkat pemikiran Yudi Latif. *Jurnal Pendidikan Tranformatif (Jupetra)*, 2(1), 1-5.
- Muhtamar, S., & Ashri, M. (2020). Dikotomi moral dan hukum sebagai problem epistemologis dalam konstitusi modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 123-149.
- Nasir, M., & Muhammad, M. (2024). Analisis perkembangan kurikulum di Indonesia: Masa lalu, kini, dan masa depan. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 228-236.
- Ningsih, S. E., Anisa, K., & Mislaini, M. (2025). Sistem Pendidikan di Jepang dan Korea Selatan. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 280-295.
- Noer, R. Z., Mustopa, D., Ramly, R. A., Nursalim, M., & Arianto, F. (2023). Landasan filosofis dan analisis teori belajar dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(4), 1559-1569.
- Nuraffah, W., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4), 98-104.
- Nurchayawati, E., Wijayanto, C. S., & Apipudin, A. (2023). Implementasi nilai religi pada sila pertama untuk ketahanan nasional yang unggul. *Jagaddhita: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 2(2), 1-10.
- Prasety, E. J., & Widiadi, A. N. (2023). Mengasah profil pelajar Pancasila dengan sosiodrama: Studi kasus pembelajaran sejarah di Malang. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 6(2), 183-192.
- Prasetyono, E. (2022). Menggagas fusi horison dalam hermeneutika Hans Georg Gadamer sebagai model saling memahami bagi dialog antarbudaya dengan relevansi pada Pancasila sebagai landasan dialogis filosofis. *Studia Philosophica et Theologica*, 22(1), 63-95.
- Pristiwiyanto, P. (2021). Pancasila dalam kajian filsafat: Ontologi, epistemologi dan aksiologi. *Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2, 253-262.
- Putrawan, B. K. (2022). Epistemologi dalam pemikiran Alfred North Whitehead. *Studia Philosophica et Theologica*, 22(1), 96-113.

- Qolbi, S. K., & Hamami, T. (2021). Impelementasi asas-asas pengembangan kurikulum terhadap pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1120-1132.
- Rahman, A., & Robandi, B. (2024). Foundations of Kurikulum Merdeka development in elementary education (from a philosophical perspective). *Inovasi Kurikulum*, 21(1), 385-402.
- Ramadani, A. C., Az-Zahra, F., & Mawarni, H. D. (2023). Implementasi nilai Pancasila sila kedua dalam kehidupan bermasyarakat. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 347-352.
- Ramdhani, S. W. (2021). Analisis linguistik pancasila berdasarkan epistemologi, ontologi, dan aksiologi. *Metalinguage: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(1), 1-18.
- Rokhim, M. M., Rahmat, M., & Surahman, C. (2019). Pemikiran Tan Malaka dan relevansinya dengan pendidikan Islam. *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education*, 6(1), 55-69.
- Rokhmah, D. (2021). Ilmu dalam tinjauan filsafat: Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 172-186.
- Saepullah, A. (2020). Epistemologi falsifikasionisme Karl R. Popper: Relevansinya bagi teologi dan pemikiran keislaman. *Journal of Islamic Civilization*, 2(2), 60-71.
- Safarudin, L.O.M., & Rusman, R. (2021). Model implementasi kurikulum Ornstein dan Hunkins: Modernisme dan Postmodernisme. *Inovasi Kurikulum*, 18(2), 141-156.
- Saparina, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui praktik kebebasan berpendapat di Indonesia. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 49-62.
- Saumantri, T. (2022). Metafisika empirik dalam pemikiran David Hume. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 7(2), 231-244.
- Setiyadi, B., Suryani, I., & Framadita, R. (2022). Landasan dan asas pengembangan kurikulum. *Daiwi Widya: Jurnal Pendidikan*, 9(2), 56-63.
- Sunarso, S., Hidayah, Y., Firmasnyah, A., & Arpanudin, I. (2024). Content analysis of Pancasila and civic education curriculum at the junior high school level in Indonesia: Philosophical perspectives in affirming civic identity. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 98-106.
- Surajiyo, S. (2021). Tinjauan epistemologi terhadap pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. *Ikraith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 54-62.
- Susanto, E. (2021). Sila ke-empat Pancasila dan iklim demokrasi Indonesia saat ini. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 84-93.
- Tamang, Y. B. (2023). Philosophical perspectives towards curriculum. *Innovative Research Journal*, 2(2), 147-152.
- Tinambunan, K., Situmorang, S. H., Naiborhu, M., & Purba, A. (2022). Hubungan literasi digital dengan implementasi nilai-nilai Pancasila siswa kelas XII SMK Swasta Harapan Bangsa tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 47-61.
- Utomo, E., Darmuki, A., & Surachmi, S. (2024). Peran epistemologi filsafat dalam mengembangkan berpikir kritis bagi anak sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(4), 3033-3047.
- Widiandari, F., Khoiri, N., & Syahnaz, A. (2023). Penguatan nilai-nilai religiusitas remaja pada era digital. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1661-1667.
- Yusuf, M. Y., Tanjung, A., & Piliang, F. M. (2023). Implementasi nilai nilai Pancasila melalui budaya sekolah di era digital 4.0 pada Madrasah Aliyah Swasta Al Ishlahiyah Binjai. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3243-3247.
- Zulfan, Z. (2018). Pemikiran politik Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Rousseau tentang perjanjian sosial. *Jurnal Serambi Akademica*, 6(2), 30-35.